

## **Tatkala Agama Dijadikan Obor Menjalankan Kekuasaan**

Al Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam adalah merupakan petunjuk atau hudan bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Tatkala seorang menjadi kepala keluarga, isteri, anak, guru, pemimpin, manajer, dan lain-lain, termasuk pejabat pemerintah dalam menjalankan peran-perannya menjadikan al Qur'an sebagai pedoman, maka perilaku dan keputusannya akan benar. Sebab al Qur'an memang pedoman hidup bagi siapa saja di dunia ini. Tidak saja benar, tetapi juga mendatangkan kebahagiaan, kebersamaan, keadilan dan akhirnya juga melahirkan keindahan.

Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Berau, Kalimantan Timur atas undangan panitia PHBI, diminta memberi ceramah pada peringatan Nuzulul Qur'an. Tiba di tempat itu kira-kira menjelang sholat dhuhur. Saya oleh penjemput dari Bandara, diajak bersillaturahim pada Bupati di kantornya. Tatkala menuju ruang kerjanya, sebelum membuka pintu, ternyata orang nomor satu di kabupaten ini sudah di depan pintu, mengenakan sandal untuk menuju ke masjid yang berada di lokasi kantor kabupaten itu. Saya diajaknya sekalian ke masjid untuk sholat berjama'ah. Saya diberitahu oleh staf yang menjemput, kebiasaan Bupati setiap mendengar adzan, ia segera meninggalkan tempat kerjanya, mengambil air wudhu dan menuju masjid untuk sholat berjama'ah. Apa yang dilakukan oleh Bupati adalah merupakan kebiasaan sejak lama, sejak ia mulai bekerja di kantor ini, sebelum menjadi bupati dan tidak henti sampai menjabat sebagai Bupati sejak dua tahun yang lalu di kabupaten itu.

Apa yang menjadi kebiasaan Bupati itu, tentu diikuti oleh pejabat dan pegawai di kantor itu. Masjid di lingkungan kantor Bupati pada waktu-waktu sholat menjadi ramai. Semua jama'ahnya berpakaian seragam kantor. Rasanya memang kelihatan indah sekali. Mereka bekerja sejak pagi, yang mungkin menjelang tengah hari kelihatan lelah, kemudian menjelang adzan mereka segera membasuh wajah dan tangan, mengusap rambut dan membasuh kaki, menjadikan mereka segar kembali. Kemudian secara berjama'ah, mereka menghadap Allah swt., melalui sholat berjama'ah. Segera selesai sholat, mereka menuju tempat kerjanya masing-masing melakukan aktivitas rutinnnya, mengerjakan apa saja yang menjadi tugas mereka.

Saya membayangkan alangkah indahnya jika di semua kantor, baik pemerintah maupun swasta menjalankan kebiasaan serupa itu. Dengan begitu, pimpinan kantor tidak saja berperan sebagai birokrat, melainkan juga pemimpin kehidupan yang lebih utuh, ialah memberikan tauladan kepada semua bawahannya, termasuk mengingat Allah setiap saat. Masyarakat yang bemuansa paternalistik seperti di Indonesia ini, memang memerlukan ketauladan dalam segala hal. Tidak saja, tauladan dalam menjalankan tugas-tugas formal rutinnnya di kantor, melainkan juga dalam hal menjalankan kegiatan spiritual. Saya yakin kegiatan spiritual seperti itu juga akan berdampak positif terhadap prestasi kerja dalam melayani masyarakat sehari-hari.

Setelah sholat selesai, Bupati mengajak saya berbincang-bincang di kantornya dengan beberapa stafnya. Orang nomor satu di kabupaten itu memperbincangkan dua hal yang saya nilai penting, yaitu apa yang telah dilakukannya untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kemaksiatan di daerahnya. Pimpinan Daerah ini menceritakan, betapa selama ini terdapat kesenjangan di tengah masyarakatnya

sedemikian jauh jaraknya, antara yang kaya dengan yang miskin. Di kabupaten itu tidak sedikit pengusaha yang telah berhasil mendapatkan keuntungan yang sedemikian besar dari usaha mengeksploitasi sumber alam, terutama para pengusaha pertambangan. Sementara lainnya, adalah rakyat biasa yang tinggal di rumah-rumah sederhana dan masih kekurangan sekalipun sebatas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan di daerah-daerah, terutama di pedalaman masih sangat memprihatinkan. Mereka melihat bahwa itu semua sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan yang ada. Untuk menolong bagi mereka yang miskin, Bupati selalu terjun langsung memimpin sendiri pengumpulan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, bersama personil lembaga yang telah dibentuk ---BAZ, dan sekaligus membagikan hasil pengumpulan zakat itu kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dalam kesempatan kunjungan itu, saya mengikuti kegiatan Bupati, tatkala ia mengumpulkan para pengusaha, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, membicarakan tentang pembayaran, pengumpulan dan pembagian zakat kepada yang berhak. Yang sangat menarik dan bahkan mengharukan, ternyata Bupati dapat menjelaskan dengan ilustrasi keadaan sebenarnya bagaimana rakyat kecil hidup sehari-hari dalam keadaan yang serba kekurangan. Sementara pengusaha di kabupaten itu, telah berhasil mengeruk keuntungan yang sedemikian besarnya. Tidak selayaknya, demikian ditegaskan oleh Bupati, para pengusaha tidak menghiraukan penderitaan rakyat. Digambarkan keadaan rakyatnya oleh Bupati, tidak sedikit pakaian mereka terkena getah dan itulah yang dipakai sepanjang waktu, tatkala mereka bekerja, beristirahat dan juga bahkan untuk tidur. Saya bertanya, tentang perkembangan BAZ kepada pengurusnya. Dijawab bahwa sejak kepemimpinan Bupati saat ini, perkembangannya sangat pesat, hasil pengumpulan zakat meningkat berlipat kali dan semua diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya.

Bupati juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada jangka panjang, tidak ada jalan lain kecuali melalui peningkatan dan pemerataan pendidikan secara terus menerus. Selama ini, ia sudah berhasil membebaskan biaya wajib belajar 9 tahun. Artinya bagi siswa SD dan SLTP dibebaskan dari biaya pendidikan dan direncanakan mulai tahun 2009 akan diberlakukan pula sampai tingkat SLTA. Yang dipikirkan oleh Bupati, bahwa pembebasan biaya pendidikan tidak cukup. Selain itu harus diusahakan pula bantuan untuk pembelian buku, sepatu dan tas sekolah. Oleh karena itu, uluran tangan dari berbagai pihak, terutama para pengusaha harus dilakukan secara terus menerus.

Usaha lainnya yang dilakukan oleh Bupati yang sempat disampaikan adalah menghilangkan segala jenis penyakit masyarakat. Agar masyarakat sehat, maka sumber-sumber penyakit harus dienyahkan. Dia telah melarang penggunaan miras secara tegas di wilayahnya, melalui surat keputusan yang diterbitkannya. Sekalipun keputusan itu, dianggap berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat misalnya, ia mengatakannya tokh keputusan yang diambil sudah sama dengan peraturan yang datang dari Allah swt. Islam melarang segala bentuk minuman dan makanan yang haram, karena merusak jiwa dan akal. Bupati juga secara tegas melarang kegiatan prostitusi di wilayahnya. Para wanita pekerja seks, yang dulu jumlahnya cukup banyak, mereka dipulangkan ke tempat asal kelahirannya masing-masing --- --umumnya mereka berasal dari Jawa, dengan dibekali setiap orang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas kebijakan itu, kini di kabupaten itu sudah bersih dari jenis kegiatan maksiat itu.

Dari perbincangan selama kunjungan itu, saya mendapatkan kesan betapa semangat, niat mulia dan usaha-usaha nyata yang dilakukan oleh pimpinan daerah ini dalam mengantarkan daerahnya menjadi maju, makmur, adil dan merata. Tampak tergambar dengan jelas, keyakinan yang ada pada mereka, bahwa membangun masyarakat tidak akan mungkin mengabaikan faktor agama. Masyarakat menjadi maju manakala didasarkan pada akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia hanya bisa dibangun melalui pendidikan agama yang cukup. Karena itu Bupati juga memberikan subsidi kepada kegiatan keagamaan, termasuk memberikan honorarium kepada para guru-guru mengaji yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti TPA (Taman Pendidikan al Qur'an), Madrasah Diniyah dan bahkan juga pengelolaan masjid atau tempat ibadah lainnya.

Setelah memperhatikan, betapa besar jiwa pengabdian dan ketulusan yang diberikan oleh sosok penguasa daerah seperti ini, saya lantas berpikir, apa selayaknya mereka tatkala mencalonkan diri sebagai Bupati harus mengeluarkan biaya terlalu tinggi, yang kadang hingga tidak masuk akal? Apa tidak seharusnya, seluruh biaya pemilihan jabatan bupati/walikota/ gubernur dan bahkan presiden dibebankan seluruhnya pada anggaran negara. Dan bahkan bukankah semestinya diberlakukan larangan keras bagi para kandidat mengeluarkan dana sepeserpun, agar setelah menjadi pejabat, mereka tidak lantas melakukan korupsi sedikitpun. Hal seperti ini, kiranya sangat mendesak dipikirkan secara serius tatkala bangsa ini sedang memperbaiki keadaan dari berbagai aspeknya menuju cita-cita luhur dan mulia. Allahu a'lam